BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

World Food Programme (WFP) adalah suatu lembaga internasional yang bergerak di bidang kemanusiaan dan terbesar di dunia saat ini dengan fokus utama yaitu menangani tentang bahaya kelaparan. (Australian AID, 2012) WFP juga merupakan lembaga internasional yang dalam keadaan darurat sering kali menjadi wadah pertama yang memberikan bantuan makanan kepada para korban perang, konflik sipil, kekeringan, banjir, gempa bumi, angin topan, kegagalan panen dan bencana alam lainnya. Ketika keadaan darurat mereda, WFP membantu masyarakat membangun kembali kehidupan yang sebelumnya hancur akibat dari masalah-masalah yang terjadi. WFP bekerja untuk memperkuat ketahanan masyarakat yang terkena dampak krisis yang berlarut-larut dengan menerapkan prinsip pembangunan dalam respons kemanusiaan. (World Food Programme, 2018)

WFP pertama kali dibentuk pada 24 November 1961 atas usulan Presiden Amerika Serikat pada saat itu yaitu Dwight Eisenhower dengan tujuan untuk memberikan bantuan makanan melalui sistem PBB dan FAO. WFP telah bekerja pada banyak negara di dunia yaitu sekitar 82 negara termasuk di Sudan Selatan. Pada tahun 1963, WFP untuk pertama kalinya meluncurkan program bantuan yang diberikan kepada Sudan. Tahun 1965 WFP dianggap sebagai salah satu program PBB yang paling lengkap karena kehadirannya dianggap layak, sukses dan berguna sebagai bantuan multilateral. (World Food Programme, 2018)

Salah satu prioritas utama WFP adalah *zero hunger* atau tanpa kelaparan. Menurut WFP memberantas kelaparan dan kekurangan nutrisi pada tubuh manusia adalah suatu tantangan yang besar pada zaman modern saat ini. Hal tersebut tidak hanya menimbulkan penderitaan dan bahaya kesehatan

pada manusia, akan tetapi juga berpengaruh terhadap laju perkembangan pembangunan seperti pendidikan dan pekerjaan. Dengan bantuan makanan kemanusiaan, WFP memberikan makanan bergizi bagi orang-orang yang membutuhkan untuk menciptakan dunia tanpa kelaparan. Saat ini dunia telah berkontribusi besar dalam mengurangi kelaparan yang membuat jumlahnya menurun yaitu ada 216 juta jiwa yang kelaparan dengan angka yang cenderung lebih sedikit daripada tahun 1990-1992, meskipun terjadi peningkatan 1,9 miliar populasi dunia. (World Food Programme, 2018)

World Food Programme (WFP) sebagai suatu badan atau lembaga internasional yang berada dibawah PBB dan FAO jelas memliki peran yang sangat penting untuk membantu negara-negara berkembang yang memilik konflik ataupun bencana. Hal tersebut dapat dilihat misalnya saja dari dana bantuan yang diberikan WFP kepada Indonesia. Pada tahun 1964 ketika terjadi letusan Gunung Agung di Bali, WFP memberikan bantuan sebesar 1 juta dolar Amerika. Bantuan tersebut diberikan sebagai dukungan perbaikan jalan-jalan, lahan, rekonstruksi perumahan, rehabilitasi saluran irigasi dan penanaman tanaman pangan. Dan pada tahun 1998 WFP kembali hadir memberikan bantuan di Indonesia dalam membantu bencana kekeringan yang terjadi akibat El Nino dan krisis moneter Asia. Sejak tahun 1998, WFP terus mengalirkan bantuannya di Indonesia seperti bantuan bencana alam yang sangat besar yaitu tsunami di Aceh tahun 2004. WFP telah membantu 20 juta masyarakat Indonesia yang rentan terhadap pangan, yang berfokus di berbagai daerah rawan bencana dan terjadi ketidakstabilan ekonomi. (Clara, 2013)

Pada tahun 2013 sampai 2017 Sudan Selatan mengalami bencana krisis pangan. Menurut *World Meters* yang diambil dari data terakhir PBB, pada tahun 2018 jumlah populasi penduduk Sudan Selatan adalah sebesar 12.830.007 penduduk. Populasi tersebut setara dengan 0,17% total populasi dunia. (Worldmeters, 2018) Sudan Selatan mencapai kemerdekaan pada 9 Juli 2011 dengan memisahkan diri dari

negara Sudan utara dan menjadi negara termuda di dunia saat ini. (Varma, 2011) Kemerdekaan Sudan Selatan ini menutup perang saudara terpanjang di Kawasan Afrika. (Knopf, 2016) Sudan selatan meraih suara bulat untuk kemerdekaannya pada suatu referendum. Referendum tersebut dilakukan untuk memenuhi persayarat CPA. (Tadesse , 2012, p. 6) *The Comprehensive Peace Agreement* (CPA) adalah sekumpulan protokol yang ditandatangani pada bulan Januari 2005 antara Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM) dan pemerintah Sudan. Perjanjian tersebut difasilitasi dalam upaya regional oleh otoritas pembangunan antar pemerintah dan komunitas internasional yaitu Amerika Serikat, Inggris dan Norwegia. Perjanjian dan kesepakatan tersebut memiliki tujuan untuk mengakhiri perang saudara II di Sudan. (Abedje, 2010) Referendum Sudan Selatan sendiri adalah salah satu hal penting dari CPA. Penandatanganan CPA di Nairobi Kenya membuat era baru dan harapan baru bagi Sudan Selatan. (Tadesse , 2012, p. 6) Setelah meraih kemerdekaan yang menandakan berpisahnya Sudan dan Sudan Selatan lantas tidak membuat konflik pada kawasan ini selesai begitu saja. Terjadi beberapa konflik internal antara kedua negara ini. Konflik tersebut antara lain seperti konflik minyak, konflik perbatasan dan konflik antar pemimpin. (Cahyanti, 2017, p. 87)

Badan-badan bantuan, termasuk Program Pangan Dunia PBB seperti WFP dan dana anak-anak UNICEF, mengatakan bahwa 4,9 juta orang lebih dari 40% penduduk Sudan Selatan membutuhkan makanan. (BBC News, 2017) Konflik sipil yang terjadi pada tahun 2013 membuat suatu gejolak sosial bagi kehidupan masyarakat Sudan Selatan, khususnya bagi para petani dalam menanam dan memanen hasil pertaniannya. Konflik tersebut memaksa banyak rakyat Sudan Selatan terpaksa harus meninggalkan rumah mereka dan berpindah tempat ke daerah bahkan negara lain.

Perang saudara yang terjadi antara pasukan propemerintah dan oposisi di Sudan Selatan sejak tahun 2013 hingga saat ini belum menemukan titik damai, padahal

keduanya telah menyepakati perdamaian pada tahun 2015. Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) mengatakan, lebih dari 70 persen warga sipil melarikan diri pada semester pertama tahun 2017, sehubungan munculnya konflik baru di wilayah Sungai Nil di Timur laut, serta wilayah Jonglei dan Greater Equatoria di selatan negara itu. (Hendrik, 2018) Karena terjadi konflik yang terus menerus dan membuat harga minyak menurun serta penghasilan menjadi rendah berakibat pada meningkatkan angka kemiskinan di Sudan Selatan, khususnya pada daerah yang terletak di kota-kota kecil Sudan Selatan. Curah hujan yang rendah mebuat terjadi penurunan hasil pertanian yang menyebabkan banyak tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik. Kondisi tersebut diperburuk oleh keadaan ekonomi yang buruk karena terjadi gejolak konflik dan menyebabkan harga makanan menjadi meningkat dan memicu terjadinya sebuah masalah yang lebih buruk yaitu terjadinya krisis pangan. (Bangun, 2017)

Ketersediaan pangan menjadi salah satu instrumen penting bagi suatu negara. Ketika suatu negara tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan maka akan berdampak pada krisis pangan. Krisis pangan adalah suatu keadaan yang genting dan berbahaya karena tidak tersedianya sumber hayati bagi manusia sehingga manusia tidak dapat bertahan hidup. Dibutuhkannya suatu *food Security* atau ketahanan pangan bagi suatu negara sebagai pondasi untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera tanpa adanya kelaparan. Pada kenyataannya ketahanan pangan ini sangat sulit untuk dicapai ketika tidak tersedianya pasokan makanan yang kemudian menimbulkan krisis pangan bagi suatu negara. (Bangun, 2017) Menurut FAO, terdapat empat dimensi/indikator yang mengindikasi suatu ketahanan pangan yaitu *Availability*, *Access*, *Utilization* dan *Stability*. (FAO, 2008) Empat dimensi/indikator tersebut harus tercapai atau dipenuhi secara bersamaan untuk menciptakanan ketahanan pangan. ketika salah satu atau beberapa indikator tersebut tidak dipenuhi maka akan menimbulkan terjadinya kerawanan pangan/krisis pangan.

Sejarah masuknya WFP di Sudan Selatan telah ada sejak tahun 1963 ketika Sudan Selatan masih menjadi satu negara dengan Sudan Utara karena sebenarnya bencana tersebut telah terjadi jauh sebelum negara ini merdeka. Untuk itu, bantuan makanan sangat penting untuk menghindari bencana kemanusiaan di Sudan Selatan. WFP telah memberikan dukungan penyelamatan jiwa kepada jutaan orang di semua sisi konflik dan di hampir semua wilayah Sudan Selatan yang dapat diakses sejak kemerdekaan tahun 2011. Dengan tujuan mengubah bantuan pangan menjadi alat untuk pembangunan perdamaian dan pembangunan di masa depan, WFP melibatkan organisasi *Grassroots Civil Society Organizations* dan memberdayakan masyarakat dengan fokus khusus pada perempuan dan anak-anak untuk mendorong peningkatan ketahanan dan kemandirian. Mitra WFP di Sudan Selatan termasuk PBB dan lembaga internasional lainnya, serta LSM lokal sebagai bagian dari upaya lokalisasi di bawah *Grand Bargain*. (World Food Programme, 2019)

Keterlibatan WFP di Sudan Selatan sendiri telah tercemin dari bantuan-bantuan yang diberikan sejak negara ini mengalami konflik yang menimbulkan terjadi krisis pangan. WFP menjadikan Sudan Selatan sebagai negara darurat atau *South Sudan emergency*. Pada tahun 2017, WFP memberikan bantuan makanan kepada sekitar 4,8 juta rakyat Sudan Selatan. (World Food Programme, 2018) WFP memberikan bantuan transfer uang tunai dan pelatihan keterampilan dengan kelompok yang pertama sebanyak 1.700 orang. WFP juga menyediakan bantuan makanan dan nutrisi untuk 273.000 orang di 11 wilayah yang terkena dampak paling buruk dari masalah pangan. (World Food Programme, 2017) Pada tahun 2018, dengan melakuan 13 misi dan 15 misi berkelanjutan tim *Integrated Rapid Response Mechanism* (IRRM) WFP menyediakan bantuan makanan dan gizi untuk membantu 200.162 jiwa, termasuk 38.362 anak di bawah usia lima tahun. (World Food Programme, 2018)

Melihat dari banyakya bantuan yang telah diberikan WFP di Sudan Selatan, ironisnya jumlah rakyat Sudan Selatan yang mengalami karawanan pangan yang parah dari tahun 2017 hingga 2018 ternyata terus bertambah dari 4,8 juta (World Food Programme, 2017) menjadi 6,3 juta orang (World Food Programme, 2018). Dengan bertambahnya angka kerawanan pangan tersebut menandakan bahwa krisis pangan yang terjadi di Sudan Selatan terus berlanjut dan WFP masih tidak berhasil menyelesaikan krisis pangan di Sudan Selatan. Hal tersebut lantas terjadi karena terdapat beberapa hambatan yang membuat program dan bantuan yang diberikan WFP di Sudan Selatan tidak berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi WFP yang sebenarnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik rumusan masalahnya sebagai berikut: "Faktor apa saja yang menjadi hambatan *World Food Programme* (WFP) dalam menyelesaikan krisis pangan di Sudan Selatan pasca kemerdekaannya?"

C. Landasan Teori

Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu **Hambatan *World Food Programme* (WFP) Dalam Menyelesaikan Krisis Pangan Sudan Selatan Pasca Kemerdekaan**, maka penulis menggunakan konsep dalam Hubungan Internasional sebagai berikut:

1. Organisasi Internasional

Banyak negara yang membutuhkan organisasi internasional untuk mengatasi masalah-masalah yang tidak bisa dihadapi oleh negara. Menurut J. Samuel Barkin dalam bukunya yang berjudul "International Organization: Theories and Institutions" Organisasi Internasional merupakan organisasi antar pemerintahan yang inklusif. Organisasi yang inklusif dapat diartikan sebagai organisasi yang dapat diikuti oleh semua pihak yang berkepentingan. (Barkin, 2006, p. 1)

Sementara itu, menurut Cheever dan Haviland yang mendefinisikan organisasi internasional secara jelas yaitu:

> "*Any cooperative arrangement instituted among state, usually by a basic agreement, to perform some mutually advantageous functions implemented trough periodic meetings and staff activities*".

Maksudnya adalah organisasi internasional terbentuk atas beberapa pengaturan kerja diantara negara bagian dengan kesepakatan dasar dan untuk melaksanakan fungsi melalui rapat rutin oleh berbagai staff dari seluruh dunia yang tergabung kedalam organisasi internasional tersebut. Secara tradisional, organisasi internasional disebut sebagai suatu lembaga formal yang anggotanya terdiri dari beberapa negara. (Pease, 2009, p. 2)

Menurut Sumaryo Suryokusumo, Organisasi internasional adalah suatu proses yang berkaitan dengan ruang lingkup perwakilan tiap-tiap wilayah negara dalam satu waktu tertentu yang bertujuan untuk melakukan kerjasama dan kompromi agar menciptakan kesejahteraan dan menyelesaikan suatu masalah. Untuk menjelaskan organisasi internasional, beliau juga menggambarkan ciri-ciri organisasi internasional yaitu permanen, memiliki instrumen dasar, dibentuk berdasarkan perjanjian dan melakukan kegitan yang sesuai dengan persetujuan bersama bukan dipaksakan. (Suherman, 2003, p. 48)

Organisasi internasional merupakan instrumen bagi negara-negara dalam melakukan tugas bersama, baik yang bersifat terogranisir maupun tidak terorganisir. Menurut Leroy Bannet (Suwardi, 2004, pp. 5-6) ,organisasi internasional mempunyai ciri yaitu:

1. Organisasi yang secara permanen melaksanakan tugas yang berkelanjutan.
2. Keanggotaannya sukarela jika memenuhi beberapa syarat.

3. Terdapat Intstrumen dasar dengan adanya tujuan, struktur dan sistem operasi.
4. Terdapat suatu organ yang secara luas sebagai wakil konferensi konsultatif.
5. Terdapat suatau sekretariat permanen untuk melanjutkan fungsi administrasi, penelitian, dan informasi yang berkelanjutan.

Menurut Harold K. Jacobson, dalam bukunya yang berjudul "Networks of Interdependence: International Organization and The Global Political System" terdapat 5 fungsi dari suatu organisasi internastional diantaranya; (Jacobson, Harold K, 1979, pp. 89-90)

1. Fungsi Informasi

Fumgsi ini melibatkan pengumpulan , analisis, pertukaran dan penyebaran data dan pendapat atau sudut pandang. Dalam hal ini organisasi dapat menggunakan stafnya untuk menjalankan fungsi ini dan mungkin hanya dapat menyediakan forum dimana perwakiln dari unit-unit yang berhak memilih dapat menjalankan fungsi ini.

2. Fungsi Normatif

Fungsi ini melibatkan ketentuan dan pernyataan suatu standar norma. Fungsi ini tidak melibatkan hal-hal yang memiliki efek mengikat secara hukum, melainkan suatu pernyataan yang dibuat untuk mempengaruhi lingkungan dimana politik domestik dan dunia dilakukan.

3. Fungsi Pembuatan Peraturan

Fungsi ini juga melibatkan ketentuan dan pernyataan suatu standar norma, namun tujuannya adalah untuk menyusun hal-hal yang dapat memiliki efek mengikat secara hukum.

4. Fungsi Pengawasan

Fungsi ini melibatkan upaya yang diambil untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku bagi mereka yang tunduk pada aturan tersebut. Fungsi ini dapat mencakup beberapa langkah, mulai dari ketika terdapat bukti bahwa telah terjadi suatu pelanggaran, kemudian bukti pelanggaran tersebut di verifikasi, hinga pemberian sanksi terhadap pelanggaran tersebut.

5. Fungsi Operasional

Fungsi ini melibatkan penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi. Dalam hal ini, contohnya seperti terkait dengan bantuan keuangan dan bantuan pasukan militer.

Saat ini Organisasi internasional telah menjadi fenomena yang sangat terkenal dalam kehidupan internasional. (Martin & Simmons, 2002, p. 192) *World Food Programme* (WFP) adalah salah satu organisasi internasional yang berada dibawah naungan PBB. WFP adalah organisasi kemanusiaan terkemuka di dunia saat ini yang memerangi kelaparan di seluruh dunia, memberikan bantuan makanan dalam keadaan darurat dan bekerja dengan masyarakat untuk meningkatkan gizi dan membangun ketahanan. Saat ini WFP membantu 80 juta orang di sekitar 80 negara setiap tahunnya. (World Food Programme, 2018)

Bila dikaitkan dengan 5 fungsi organisasi internasional menurut Harold K. Jacobson diatas, WFP melakukan fungsi-fungsi tersebut diantaranya; Pertama, fungsi informasi dalam hal ini WFP berhasil menjalankan fungsi ini dengan cara mengumpulkan data-data jumlah, kebutuhan, situasi terkini tentang bahaya kelaparan yang misalnya sedang melanda Sudan Selatan. Kedua, fungsi normatif dalam hal ini WFP telah membuat aturan-aturan atau norma serta prinsp-prinsip yang mempengaruhi dunia internasional dengan pernyataan yang dikeluarkannya. Akan tetapi, untuk mempengaruhi pemerintah negara dimana WFP melakukan program bantuan seperti yang terjadi di Sudan Selatan, WFP tidak mampu mempengaruhi

pemerintahan domestik Sudan Selatan. Ketiga, fungsi pembuatan peraturan dalam hal ini fungsi ini bisa dikatakan sama dengan fungsi normatif dimana WFP tidak begitu berhasil dalam membuat aturan-aturan atau norma yang dapat mengikat pihak-pihak yang terlibat, khusunya pemerintahan domestik suatu negara dimana WFP sedang menjalankan bantuannya. Seperti yang terjadi di Sudan Selatan, WFP terikat dengan aturan-aturan dari pemerintah Sudan Selatan sehingga ketika pemerintah Sudan Selatan melakukan pelanggaran yang membuat beberapa staf atau relawan WFP menjadi korban akibat konfik sipil yang terjadi, WFP sulit untuk memberikan sanksi hukum. Keempat, fungsi pengawasan dalam hal ini karena fungsi pembuatan peraturan WFP di Sudan Selatan tidak baik maka WFP sangat sulit untuk melakukan fungsi ini dan hal ini juga diakibatkan oleh konflik sipil yang terus terjadi yang membuat pasuka militer pemerintah Sudan Selatan mengahalngi relawan WFP untuk memberikan bantuan pada beberapa wilayah di Sudan Selatan. Dan kelima, fungsi operasional dalam hal ini WFP mengatakan sampai sekarang masih membutuhkan dana untuk menyelesaikan masalah krisis pangan di Sudan Selatan karena dana yang dibutuhkan tidak sesuai dana yang didapatkan.

2. Food Security

Menurut Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan, Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Istilah ketahanan pangan pertama kali muncul di PBB pada tahun 1971 untuk menciptakan dunia bebas dari krisis, terutama pada negara berkembang dari krisis produksi dan krisis pemasok makanan pokok. Tujuan utama menciptakan ketahanan pangan pada masa itu terletak pada pemenuhan kebutuhan pokok dan membebaskan dunia dari krisis pangan. Definisi ketahanan pangan oleh PBB sebagai berikut: (Pieris, 2015, p. 2)

"Food security is availability to avoid acute food shortages in the event of wide spread coop vailure or other disaster".

Pada *World Food Summit* 1996, dijelaskan bahwa Ketahanan pangan adalah suatu keadaan dimana jika orang-orang, setiap saat, memiliki akses secara fisik dan ekonomi terhadap makanan yang baik dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka agar dapat mecipatakan kehidupan yang lebih baik dan sehat. Terdapat empat dimensi yang didalamnya memuat beberapa indikator utama yang dapat mengidentifikasikan ketahanan pangan sebagai berikut: (FAO, 2008, p. 1)

1. Ketersediaan fisik makanan (Availability)
   Ketersediaan pangan terkait dengan aspek persediaan keamanan pangan dan ditentukan oleh tinggi rendahnya produksi pangan, persediaan dan perdagangan secara keseluruhan.
2. Akses ekonomi dan fisik makanan (Access)
   Persediaan makanan yang ada pada level nasional atau internasional tidak dapat dikatakan bisa memenuhi ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga. Masalah-masalah yang akan dihadapi tentang akses pangan yang tidak baik dapat menghasilkan peningkatan fokus kebijakan pada pemasukan, pengeluaran, pasar dan harga untuk dapat mencapai tujuan ketahanan pangan. Hal ini juga terkait dengan kekurangan gizi dan kerawanan pangan.
3. Pemanfataatan pangan (Utilization)
   Pemanfaatan pangan dapat diartikan sebagai cara tubuh membuat sebagian besar berbagai nutrisi dalam makanan. Energi yang cukup dan asupan nutrisi oleh individu adalah hasil dari kerja keras yang baik dan praktik pemberian makan, persiapan makanan, berbagai diet dan distribusi makanan di dalam rumah tangga. Dengan pemanfaatan secara biologis yang baik terhadap makanan yang dikonsumsi, dapat menentukan status gizi individu masyarakat.

4. Stabilitas dari tiga dimensi diatas (Stability)
   Ketika asupan makanan saat ini dapat tercukupi, namun hal ini masih dianggap tidak menjamin seseorang aman terhadap pangan karena jika seseorang memiliki akses yang tidak baik pada makanan secara terus-menerus, maka akan memperburuk status gizi seseorang. Kondisi cuaca buruk, ketidakstabilan politik, atau faktor ekonomi (pengangguran, kenaikan harga pangan) dapat juga berdampak pada status ketahanan pangan seseorang bahkan suatu negara.

Untuk mewujudkan ketahanan pangan maka empat indikator diatas harus tercapai dan dipenuhi secara bersamaam. Jika tidak tercapai secara bersamaan maka akan berdampak pada terjadinya kerawanan pangan/krisis pangan.

Sudan selatan sebagai negara yang termuda di dunia saat ini dihantui dengan terjadi gejolak krisis pangan didalam negara. Krisis pangan tersebut terjadi karena tidak adanya *food security* atau ketahanan pangan pada negaranya. Bila dilihat dari empat dimensi yang dijelaskan FAO diatas Sudan selatan sangat jelas tidak memiliki ketahanan pangan yang baik. Pertama, terkait dengan ketersediaan fisik makanan, masyarakat Sudan selatan saat ini sulit melakukan produksi pertanian sehingga membuat ketersediaan pangan disana rendah yang dipengaruhi oleh keadaan cuaca buruk yang cenderung terus-menerus hujan dan membuat hasil produksi juga menurun. Kedua, terkait dengan akses ekonomi dan fisik makanan, pada dasarnya dimensi ini berhubungan degan ketersediaan fisik yang sudah dijelaskan yaitu Sudan selatan memiliki akses pangan yang sulit yang tidak menjamin ketahanan pangan pada rumah tangga. Ketiga, terkait dengan pemanfaatan pangan, banyak rakyat Sudan selatan mengalami gizi buruk karena energi dan asupan nutrisi dari pemanfaatan makanan yang dikonsumsi tidak berigizi dan tidak sehat. Dan keempat, terkait dengan stabilitas dalam negara itu sendiri, misalnya saja kondisi cuaca buruk di Sudan Selatan, Ketidakstabilan politik antara para pemimpin negara, kenaikan

harga pangan juga membawa dampak buruk bagi status ketahanan pangan Sudan Selatan.

Untuk menjelaskan ketahanan pangan Sudan Selatan setelah adanya bantuan *World Food Programme* (WFP), maka bisa dilihat pada laporan situasi yang dikeluarkan oleh WFP setiap tahnnya. Pada Oktober-Desember 2017 dan Februari-April 2018 terjadi peningkatan kerawanan pangan yang cukup signifikan yaitu naik dari 4,8 juta orang (World Food Programme, 2017) menjadi 6,3 juta orang (World Food Programme, 2018). Dapat disimpulkan bahwa, ketika terjadinya kerentanan pangan seperti kasus yang terjadi pada Sudan Selatan, yang menunjukan terjadinya peningkatanan kerawanan pangan. hal tersebut berarti bahwa empat indikator/dimensi yang menciptakan ketahanan pangan belum tercapai bahkan setelah munculnya bantuan dari *World Food Programme* (WFP).

D. Hipotesa

Berdasarkan teori dan rumusan masalah diatas dapat diambil kesimpulan sementara, hambatan yang dihadapi WFP dalam menyelesaikan krisis pangan di Sudan Selatan pasca kemerdekaan terkait dengan beberapa fungsi organisasi internasional yang tidak berjalan dengan baik yaitu fungsi pembuatan peraturan, fungsi pengawasan dan fungsi operasional yang disebabkan oleh beberapa faktor penghambat diantaranya yaitu;

1. WFP tidak mampu mempengaruhi pemerintahan Sudan Selatan yang sedang mengalami konflik politik.
2. Akses Sudan Selatan yang sulit dijangkau oleh WFP.
3. Dana WFP yang terbatas dan tidak stabil.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana perkembangan WFP dalam membantu negara lain mengatasi masalah kelaparan terutama pada negara Sudan Selatan.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana kondisi pangan Sudan Selatan pasca kemerdekaannya.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana konflik yang terjadi di Sudan Selatan pasca kemerdekaan sehingga menimbulkan bencana krisis pangan tersebut.
4. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang menghambat WFP dalam menyelesaikan krisis pangan Sudan Selatan pasca kemerdekaan.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah sekumpulan hukum, aturan, dan tahapan tertentu yang dikelolah dan ditetapkan berdasarkan suatu karangka ilmiah dalam melaksanakan suatu penelitian yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. (Herdiansyah, 2010, p. 17)

Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Metode deskriptif bermaksud untuk menggambarkan fakta-fakta yang ada pada penanganan krisis pangan yang dilakukan oleh *World Food Programme* (WFP) di Sudan Selatan.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari banyak literatur serta sumber yang ada, seperti buku yang, jurnal, artikel, website, surat kabar, dan berbagai data yang berkaitan tentang WFP dan Sudan Selatan. Buku yang digunakan bersumber dari buku online seperti dari Library Genesis Rusia, Perpustakaan Nasional RI dan lain-lain. Buku offline diperoleh dari perpustakaan UMY dan Perpustakaan yang ada di Jogja. Untuk jurnal dan artikel diperoleh dari jurnal luar dan dalam negeri.

Dan website dan surat kabar yang digunakan diperoleh dari website WFP, PBB, FAO, dan lain-lain.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka (library research). Telaah pustakan digunakan dengan cara mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan isu dan masalah yang dibahas pada penelitian ini, dan kemudian dianalisis. Literatur disini berupa buku-buku, jurnal, dokumen, surat kabar, situs-situs internet, serta laporan-laporan yang berkaitan dengan WFP dan Sudan Selatan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data kulitatif adalah teknik menganalisis permasalahan, dan menggambarkannya berdasarkan fakta-fakta yang ada, kemudian menghubungkan fakta tersebut dengan fakta lainnya sehingga menghasilkan sebuah argumen yang tepat.

Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif. Metode ini pada awalnya menggambarkan permasalahan yang ada secara umum dan kemudian menarik kesimpulan secara khusus.

G. Batasan Penelitian

Batasan penelitian digunakan untuk menghindari terjadinya penyimpangan pembahasan, dan membantu penulis dalam membuktikan hipotesa dan pokok permasalahan yang telah ditentukan. Pembatasan dalam sebuah penelitian juga digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan objek penelitian agar lebih jelas dan spesifik, sehingga permasalahan dan kajian tidak keluar dari isu atau masalah yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini penulis akan membatasi kajian

Hambatan *World Food Programme* (WFP) dalam menyelesaikan krisis pangan Sudan Selatan pasca kemerdekaannya saja.

H. Rencana Sistematika Penelitian

BAB I

Pada bab ini bersisi Pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Teori, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Jangkauan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai tentang organisasi *World Food Programme* (WFP). Dengan sub bab yang berisi sejarah WFP, Prioritas utama WFP dan kontribusi WFP di negara lain.

BAB III

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai masalah pangan Sudan Selatam sebelum dan sesudah adanya bantuan dari *Wolrd Food Programme* (WFP). Dengan sub bab yang berisi sejarah singkat Sudang Selatan, Politik pemerintahan Sudan Selatan dan Pangan Sudan Selatan sebelum dan sesudah WFP masuk.

BAB IV

Pada bab ini penulis akan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi hambatan *World Food Programme* (WFP) dalam menyelesaikan krisis pangan Sudan Selatan pasca kemerdekaan.

BAB V

Bab ini berisi Penutup/kesimpulan.